

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN KOTA DEPOK 2024

kerjasama:



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok**



**Departemen Statistika
FMIPA - IPB University**



Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2024

Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2024

Ukuran Buku / *Book Size* : 14,8 cm × 21 cm

Jumlah halaman / *Total size* : 50 halaman / 50 pages

Naskah / *Manuscript* : Departemen Statistika, FMIPA,
IPB University

Gambar kulit dan Seting /
Cover design and Setting : Departemen Statistika, FMIPA,
IPB University

Diterbitkan oleh / *Published by* : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya
May be cited with the reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2024 dapat diterbitkan.

Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan Kota Depok, khususnya untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di kecamatan. Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA-IPB) yang telah menyusun Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2024, begitu juga kepada semua pihak yang sudah berperan dalam penerbitan buku ini.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Depok, September 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok,



Drs. Manto, MSi
NIP. 19670504 198612 1 002

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyediakan estimasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok. Nilai IPM tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kualitas penduduk di masing-masing kecamatan. Hasil kajian dan analisis pada buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan manusia antar kecamatan.

Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan kepercayaan kepada Departemen Statistika - FMIPA, Institut Pertanian Bogor, untuk bekerjasama menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain, khususnya Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data utama.

Atas nama Departemen Statistika - FMIPA IPB, kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan secara umum di Kota Depok.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, September 2024
Ketua Departemen Statistika
FMIPA – IPB University



Dr. Bagus Sartono
NIP. 197804112005011002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Target Kinerja Keluaran.....	5
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Kerangka Pikir.....	6
2.2. Metodologi Survei.....	7
2.2.1. Penyusunan Instrumen Survei.....	7
2.2.2. Pemilihan lokasi dan objek survei	8
2.2.3. Metode Pengumpulan Data	11
2.3. Metode Penjaminan Mutu Data.....	13
2.3.1. Persiapan Survei	14
2.3.2. Pelaksanaan Survei.....	14
2.3.3. Entri Data	15
2.4. Analisis Data	16
2.4.1. Statistika Deskriptif.....	16

2.4.2. Pendugaan Langsung Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kota	16
2.4.3. Pendugaan Tidak Langsung IPM Tingkat Kecamatan Melalui Metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE)	16
2.5. Kebutuhan Data untuk Penghitungan IPM Level Kecamatan	19
BAB III INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN KOTA DEPOK	27
3.1. Urgensi IPM	27
3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok	28
3.3. Angka Harapan Hidup	32
3.4. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	34
3.5. Harapan Lama Sekolah	35
3.6. Pengeluaran Perkapita dan Alokasi Tabungan	36
3.7. Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok	39
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Sekunder Dan Sumber Data.....	7
Tabel 2 Sebaran Banyak Kelurahan Setiap Kecamatan di Kota Depok.....	9
Tabel 3 Sebaran Jumlah Sampel kelurahan	10
Tabel 4 Sumber Data dalam Pengukuran IPM.....	20
Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2019 – 2024	31
Tabel 6 Angka Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Tahun)	32
Tabel 7 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Tahun)	34
Tabel 8 Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Tahun)	35
Tabel 9 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Rp. Ribu)	36
Tabel 10 Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019 – 2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Desain Penentuan Objek Survei dan Lokasinya	8
Gambar 2 Hubungan antara ukuran contoh (sampel) dengan <i>error</i> pendugaan	12
Gambar 3 Skema <i>systematic random sampling</i>	13
Gambar 4 Alokasi Tabungan (dalam ribu/perkapita/tahun).....	39
Gambar 5 IPM Tiap Kecamatan di Kota Depok Tahun 2024.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia tidak terlepas dari manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Peningkatan mutu sumber daya manusia adalah suatu keharusan, yang tidak saja bertumpu pada tanggung jawab pemerintah (negara) namun merupakan tanggung jawab semua pihak baik keluarga dan masyarakat.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Artinya, faktor pembangunan manusia (SDM) harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan.

Pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak (*enlarging the choice of people*), yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli.

Otonomi daerah yang merupakan proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antar wilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Bicara mengenai keberhasilan pembangunan tidak lagi terbatas pada alat ukur yang sudah ada seperti PDRB, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, tetapi telah mengarah kepada objek pembangunan itu sendiri berupa pembangunan manusia dengan berpedoman pada empat pilar yaitu produktivitas (*Productivity*), pemerataan (*Equity*), kesinambungan (*Sustainability*) dan pemberdayaan (*Empowerment*). Untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tentunya dibutuhkan masyarakat yang tidak hanya unggul dalam segi kuantitas, tetapi juga unggul dari segi kualitas. Mengutip dari *Human Development Report* (HDR) yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia dari berbagai perspektif digunakan berbagai indikator seperti PDRB, *Gini Ratio* dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang terdiri dari komponen indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. Maka pembangunan manusia memandang semua program kegiatan pembangunan harus dipusatkan pada upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemajuan (*achievement*), kapasitas (*capability*), dan kebebasan (*freedom*) manusia sesuai dengan arah reformasi. Oleh karena itu, indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia bisa dijadikan alat untuk melihat, merencanakan dan menganalisis pembangunan manusia.

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH

merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan 4 Indeks Pembangunan Manusia.

Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusianya. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan hingga tingkat kecamatan, perlu diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia di tingkat kecamatan perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang memberi kesempatan untuk mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk di masing-masing kecamatan di Kota Depok.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan terhadap kesejahteraan rakyat, tentunya harus diketahui apa sajakah yang menjadi indikator kesejahteraan rakyat. Adapun indikator kesejahteraan rakyat antara lain:

- **Kependudukan**

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi, distribusi, pertumbuhan dan beban ketergantungan. Di mana kelima hal tersebut saling berkaitan antara satu dan lainnya. Permasalahan kependudukan akan terus membebani proses pembangunan secara menyeluruh jika kualitas sumber daya manusia yang terbentuk masih rendah.

- **Pendidikan**

Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu

dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan diantaranya adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi sekolah (APS). Partisipasi sekolah penduduk di dalam IPM metode baru digambarkan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS).

- Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Indikator kesehatan antara lain angka harapan hidup, keluarga berencana dan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan antara lain dapat dilihat dari kualitas dan fasilitas fisik perumahan termasuk di dalamnya sanitasi perumahan dan lingkungan, ketersediaan air bersih dan kondisi fisik perumahan (misalnya: jenis lantai, atap dan dinding).

- Ekonomi

Indikator ekonomi terdiri dari kemampuan daya beli masyarakat, dan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Empat Indikator Kesejahteraan rakyat (Inkesra) tersebut erat kaitannya dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di mana IPM merupakan suatu indeks komposit yang dibentuk dari tiga komponen yang terdapat dalam Inkesra yaitu: Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Untuk melihat perkembangan pembangunan manusia 2024, dipandang perlu untuk menyusun Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan Analisis Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan estimasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok yang dapat menjelaskan kualitas penduduk di masing-masing kecamatan.
2. Menyediakan estimasi data IPM per kecamatan sehingga memungkinkan untuk membandingkan antar kecamatan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu kecamatan relatif terhadap kecamatan lainnya.

Dengan tersedianya publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan manusia antar kecamatan.

1.3. Target Kinerja Keluaran

Target Kinerja Keluaran adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok tahun 2024 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Angka Harapan Hidup Kota Depok yang dirinci berdasarkan Kecamatan tahun 2024 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun);
- c. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Depok berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun);
- d. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Depok menurut Kecamatan tahun 2024 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun);
- e. Pengeluaran Perkapita disesuaikan di Kota Depok menurut Kecamatan Tahun 2024 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (000 Rp.)

BAB II METODOLOGI

2.1. Kerangka Pikir

Pengukuran IPM dibentuk oleh 3 komponen berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Lebih lanjut, IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan (yang dibangun dari indikator angka harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah) dan indeks kemampuan daya beli. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain, artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Oleh karena itu setiap komponen IPM harus distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

Kajian Penentuan Indeks Pembangunan Manusia di 11 Kecamatan di Kota Depok dilakukan melalui kajian survei untuk memperoleh data primer dari masyarakat, pemodelan dan analisis data survei serta data sekunder. Khusus untuk Kota Depok, saat ini informasi IPM yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah pada level Kota Depok, karena data-data survei pada level kecamatan tidak memadai. Dengan jumlah 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok maka survei data-data terkait dengan pengukuran IPM membutuhkan dana dan usaha yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran dengan penggunaan metode pendugaan area kecil (*small area estimation*). *Small Area Estimation* (SAE) adalah suatu teknik statistika untuk menduga parameter-parameter sub populasi yang ukuran sampelnya (contoh) kecil, sedangkan area kecil didefinisikan sebagai himpunan bagian dari populasi (sub populasi) yang ukuran contohnya kecil dengan suatu peubah tertentu yang menjadi perhatian (Rao dan Molina, 2015).

2.2. Metodologi Survei

2.2.1. Penyusunan Instrumen Survei

Kegiatan survei pada kajian ini dilakukan melalui wawancara terhadap rumah tangga dan instansi terkait. Tabel 1 memperlihatkan hubungan data yang dibutuhkan untuk pengukuran atribut IPM dan kepemilikan data tersebut. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus menggunakan instrumen yang tepat untuk menggali semua data dan informasi yang diperlukan sehingga data tersebut dapat diolah dengan baik, dianalisis dengan sempurna serta dapat diarahkan menuju kesimpulan dan hasil yang akan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan kegiatan ini. Untuk itu disusun kuesioner untuk setiap jenis responden secara seksama sehingga akan memudahkan dalam proses entri data, pengolahan data dan analisa data.

Tabel 1 Data Sekunder Dan Sumber Data

No.	Komponen IPM/Atribut	Sumber Data	Pemilik Data
1	Kesehatan: AHH	Sensus Penduduk (SP) 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Pengetahuan: RLS & HLS	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR 2022/2023	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Pengetahuan: HLS	Daftar Pesantren se-Kota Depok	Kementerian Agama
4	Pengeluaran	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul 2022/2023	Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Peubah Penjelas (<i>Auxiliary Variables</i>)	Kota Depok dalam Angka 2023/2024	Badan Pusat Statistik (BPS)
6	Peubah Penjelas (<i>Auxiliary Variables</i>)	Potensi Desa (Podes) 2022/2023	Badan Pusat Statistik (BPS)

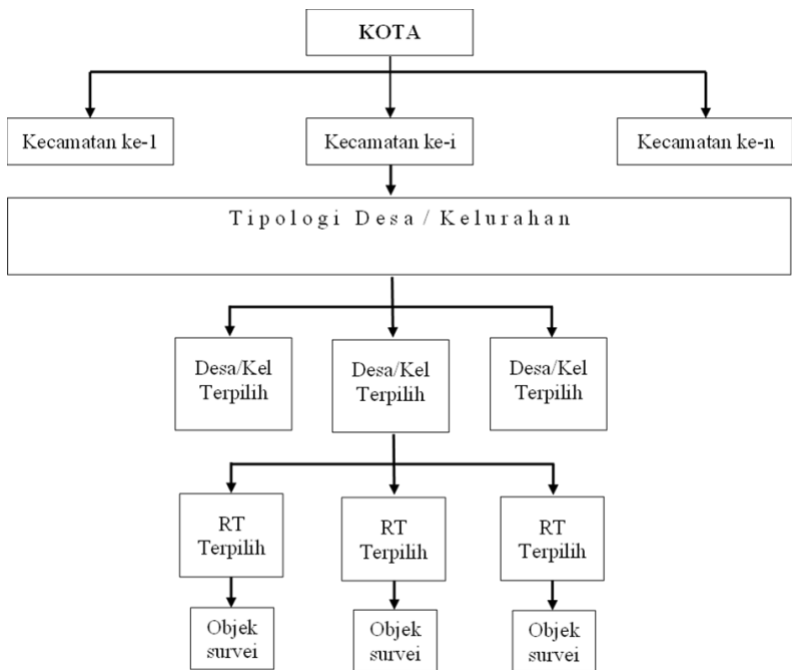
Untuk kegiatan survei ini, ada 2 (dua) macam kuesioner yang digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu:

- 1) kuesioner untuk rumah tangga,
- 2) kuesioner untuk instansi terkait

2.2.2. Pemilihan lokasi dan objek survei

a. Pemilihan Lokasi Survei

Survei dilakukan di seluruh kecamatan di wilayah Kota Depok. Namun demikian, survei tidak dilakukan di seluruh kelurahan dengan pertimbangan karena sesungguhnya banyak kelurahan yang memiliki karakteristik yang sama. Untuk kelurahan yang relatif sama karakteristiknya, diwakili oleh kelurahan lain yang sejenis. Pemilihan kelurahan lokasi survei telah mempertimbangkan keterwakilan kecamatan sehingga dapat dilakukan pendugaan Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat kota dengan tingkat akurasi tertentu.



Gambar 1 Desain Penentuan Objek Survei dan Lokasinya

Selain itu lokasi survei juga ditentukan dengan mengacu pada keterwakilan level kecamatan serta kendala-kendala tertentu (terutama keterbatasan biaya) yang menjadi pertimbangan dalam kegiatan survei ini.

Sedangkan metode penentuan ukuran sampel dibuat sedemikian rupa agar pelaksanaan survei dapat efisien dan efektif yang berorientasi pada biaya dan waktu dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah statistik yang sah dan handal. Desain penentuan lokasi dan objek survei secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

Dengan mempertimbangkan beragamnya kondisi kelurahan, maka sebelum pemilihan kelurahan, terlebih dahulu dilakukan pengklasteran (*clustering*) kelurahan berdasarkan indikator penting yang erat kaitannya dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia.

Pengklasteran ini dimaksudkan agar kelurahan yang memiliki sifat yang mirip akan berada dalam satu klaster. Karena pendugaan dilakukan pada level kecamatan, maka setiap klaster yang ada di dalam kecamatan harus diwakili oleh minimum satu kelurahan yang sudah mencakup karakteristik klaster yang terbentuk. Jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan di Kota Depok disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Sebaran Banyak Kelurahan Setiap Kecamatan di Kota Depok

No	Kecamatan	Banyak Kelurahan
1	Kecamatan Pancoran Mas	6
2	Kecamatan Cimanggis	6
3	Kecamatan Sawangan	7
4	Kecamatan Limo	4
5	Kecamatan Sukmajaya	6
6	Kecamatan Beji	6
7	Kecamatan Cipayung	5
8	Kecamatan Cilodong	5
9	Kecamatan Cinere	4
10	Kecamatan Tapos	7
11	Kecamatan Bojongsari	7
Total		63

Untuk penentuan lokasi survei di tingkat kecamatan diberlakukan ketentuan bahwa setiap ibu kota kecamatan adalah lokasi survei terpilih dengan pertimbangan di ibu kota kecamatan terdapat objek survei yang lebih variatif dan ukuran/jumlah objek surveinya cukup besar sehingga diharapkan kelurahan tersebut dapat merepresentasikan beragam perilaku objek survei yang ada di seluruh kecamatan. Kelurahan lainnya dipilih secara acak dari klaster kelurahan lainnya yang didistribusikan secara proporsional dengan menggunakan metode *random proportional to size*.

Selanjutnya, banyaknya sampel kelurahan pada setiap kecamatan disajikan pada Tabel 3. Dengan cara seperti disebutkan sebelumnya, jumlah kelurahan yang menjadi lokasi survei adalah sebanyak 21 kelurahan.

Tabel 3 Sebaran Jumlah Sampel kelurahan

No	Kecamatan	Sampel Kelurahan
1	Kecamatan Pancoran Mas	2
2	Kecamatan Cimanggis	2
3	Kecamatan Sawangan	2
4	Kecamatan Limo	1
5	Kecamatan Sukmajaya	3
6	Kecamatan Beji	2
7	Kecamatan Cipayung	2
8	Kecamatan Cilodong	2
9	Kecamatan Cinere	1
10	Kecamatan Tapos	2
11	Kecamatan Bojongsari	2
Total		21

b. Pemilihan Objek Survei

Agar diperoleh penyusunan desain survei yang baik, maka dalam kegiatan ini juga digunakan dukungan data dasar. Data dasar ini antara lain dipergunakan untuk menentukan jumlah sampel yang mewakili populasi dengan besarnya *error* yang ditentukan dan dianggap wajar. Bentuk data dasar ini merupakan daftar objek populasi yang akan disurvei. Data populasi yang

akan digunakan adalah data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah yaitu data yang dikeluarkan oleh BPS seperti data potensi desa.

Berdasarkan cara pengambilan datanya, objek-objek survei tersebut dapat dikelompokkan atas :

1. Kelompok 1 merupakan objek survei yang pengambilan sampelnya dilakukan pada kelurahan terpilih di setiap kecamatan, di mana kerangka sampelnya tersedia di setiap kelurahan. Objek survei yang termasuk dalam kelompok ini adalah Rumah Tangga.
2. Kelompok 2 merupakan objek survei yang pengambilan sampelnya di sengaja sesuai dengan ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian. Kelompok ini adalah instansi terkait.

2.2.3. Metode Pengumpulan Data

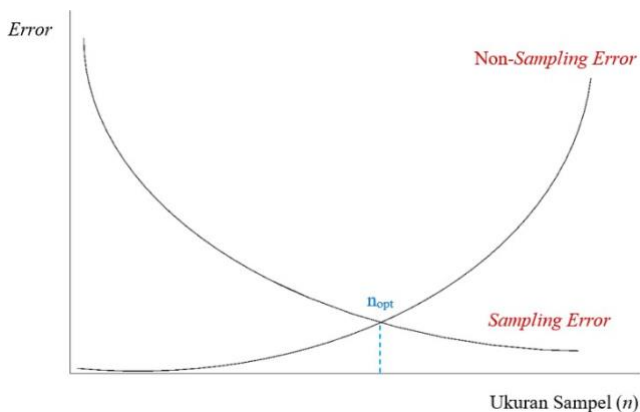
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (*face-to-face*) menggunakan instrumen kuesioner terstruktur. Instrumen ini dibuat untuk setiap objek survei.

a. Metode Sampling

Survei dilakukan untuk memperoleh dugaan Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok dengan akurasi yang tinggi dan terukur. Sehingga metode sampling yang digunakan harus berbasis pada kaidah peluang (*probability sampling*).

Agar data yang diperoleh dalam suatu survei akurat dalam melakukan inferensi terhadap populasi, maka galat (*error*) yang dihasilkan diharapkan sekecil mungkin. *Error* yang timbul dalam suatu survei secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu *sampling error* (galat akibat ketidaktepatan metode sampling) dan *non sampling error* (galat akibat sesuatu di luar metode sampling). *Sampling error* adalah *error* yang timbul karena kita tidak mengambil seluruh anggota populasi, melainkan hanya sebagian atau sampel saja. Sedangkan *non sampling error* adalah *error* yang bersumber bukan karena faktor sampel, misalnya karena kesalahan alat ukur, kesalahan wawancara, non respons, kesalahan entri data, dan lain-lain.

Agar *error* yang dihasilkan sekecil mungkin diperlukan metode sampling yang tepat. Walaupun demikian, apapun metode sampling yang dipilih tetap akan diperoleh *error*, yang disebut *sampling error*. *Sampling error* ini akan mengecil jika jumlah sampel diperbanyak. Di lain pihak, penambahan jumlah sampel berakibat pada potensi meningkatnya *non sampling error*. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penentuan jumlah sampel yang minimum tetapi optimal. Secara ringkas hubungan antara ukuran sampel dengan kesalahan pendugaan (*error*) disajikan pada Gambar 2.

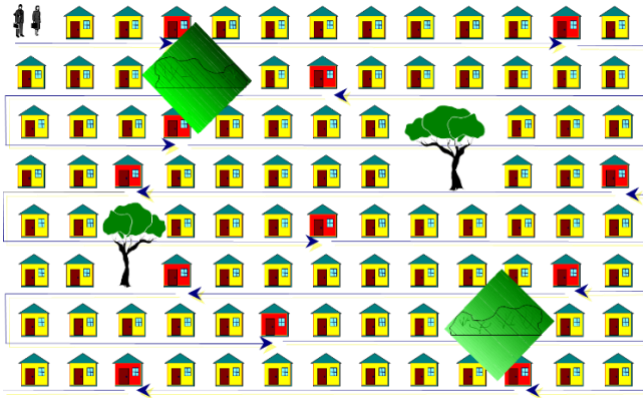


Gambar 2 Hubungan antara ukuran contoh (sampel) dengan *error* pendugaan

b. Rancangan Penarikan Contoh

Penarikan contoh tingkat Kota Depok dilakukan dengan stratifikasi pada level kecamatan. Kondisi keberagaman kelurahan pada setiap kecamatan juga dijadikan dasar dalam membentuk strata kelurahan menjadi dua strata. Agar kelurahan yang terpilih dapat menggambarkan kondisi keragaman pada level kota, maka kelurahan yang terpilih di setiap kecamatan ditetapkan minimum sebanyak 2 buah yang mewakili masing-masing klaster yang terbentuk. Setelah penentuan kelurahan yang menjadi lokasi survei, selanjutnya adalah memilih objek survei di tingkat kelurahan (rumah tangga) dengan menggunakan metode *systematic random sampling*.

Tahap awal yang dilakukan untuk memilih objek survei rumah tangga adalah pemilihan blok survei (6 RT) secara acak sistematis dari kerangka sampel. Kerangka sampel ini diperoleh dari kelurahan terpilih. Selanjutnya dari RT terpilih dipilih 5 rumah tangga secara sistematis (*systematic random sampling*) dari *listing* yang ada di RT setempat atau *listing* mandiri. Skema *systematic random sampling* disajikan pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3 Skema *systematic random sampling*

c. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan survei rumah tangga dilaksanakan pada bulan Juli 2024 yang terbagi menjadi 7 tim. Masing-masing tim mendapatkan lokasi survei sebanyak 3 kelurahan.

2.3. Metode Penjaminan Mutu Data

Seperti dijelaskan sebelumnya, *error* yang timbul dari suatu survei di samping *sampling error*, juga ada *non sampling error*. Pada survei yang berskala besar, kalau tidak dikendalikan dengan baik *non sampling error* yang timbul biasanya sangat besar. Oleh karena itu diperlukan manajemen penjaminan mutu untuk mengendalikannya. Kegiatan *Quality Assurance* (QA) atau *Quality Control* (QC) dilakukan sebagai bentuk kontrol atas kualitas data yang diperoleh dari objek survei. Agar data yang diperoleh dari objek survei akurat/valid, maka

dilakukan penjaminan mutu data secara bertahap dan bertingkat mulai dari persiapan survei, pelaksanaan survei dan entri data.

2.3.1. Persiapan Survei

Sebelum dilakukan survei, terlebih dahulu dilakukan pelatihan (*coaching*) kepada penyurvei. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menjamin penyurvei melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP pelaksanaan survei. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi gambaran umum latar belakang dilakukan survei, pentingnya data yang berkualitas, manfaat yang diperoleh dari hasil survei yang berkualitas, etika melakukan wawancara, cara mendapatkan data yang akurat dari setiap objek survei dan kelengkapan dokumen hasil survei. Diharapkan dari hasil pelatihan ini diperoleh penyurvei yang memiliki integritas dan profesional serta terhindar dari perilaku curang (*cheating*) yang kemungkinan dilakukan oleh penyurvei. Untuk menjamin pelaksanaan survei berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, setiap pelaksana survei juga dibekali dengan SOP/Panduan Pelaksanaan Survei, Panduan Wawancara, Panduan Pengisian Kuesioner, Panduan Pelaksanaan Pendaftaran Responden (*Listing*) dan Panduan Entri Data.

2.3.2. Pelaksanaan Survei

Ujung tombak dari suatu survei adalah pelaksanaan survei itu sendiri. Jika suatu survei terencana dengan baik maka kualitas data yang diperoleh juga akan tinggi. Dalam survei ini akan dilakukan manajemen secara bertingkat untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden di tempat objek survei berada, menggunakan instrumen kuesioner yang dibuat secara terstruktur disertai dengan pertanyaan-pertanyaan penyaring yang memungkinkan penyurvei dapat dengan mudah mengetahui apakah ada ketidakkonsistenan jawaban responden.

Pada tingkatan berikutnya, untuk menjamin data yang dikumpulkan berkualitas, diperlukan Koordinator Penyurvei. Koordinator Penyurvei ini bertugas menjamin penyurvei menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang

ditetapkan. Di samping itu juga, Koordinator Penyurvei bertugas menjamin mutu data yang dikumpulkan oleh penyurvei melalui verifikasi data yang dikumpulkan. Jika ada data yang dikumpulkan oleh penyurvei yang tidak diisi atau tidak akurat/valid, maka Koordinator Penyurvei berhak untuk mengembalikan *form* kuesioner kepada penyurvei untuk survei ulang atau perbaikan-perbaikan agar data yang dikumpulkan lebih akurat.

Kuesioner yang dianggap valid/akurat oleh koordinator penyurvei, selanjutnya dikumpulkan oleh koordinator penyurvei dan diserahkan pada supervisor di tingkat kelurahan. Supervisor di tingkat kelurahan selanjutnya memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan oleh penyurvei. Jika masih ada data yang tidak terisi atau tidak akurat/valid maka kuesioner dikembalikan kepada koordinator penyurvei untuk selanjutnya diserahkan kepada penyurvei dan dilakukan perbaikan-perbaikan atau survei ulang. Kuesioner yang dianggap valid/akurat oleh Supervisor di tingkat kelurahan selanjutnya diserahkan kepada petugas entri untuk dilakukan proses entri data.

Kuesioner yang digunakan dalam pengambilan data terdiri dari 8 (delapan) blok antara lain keterangan tempat (blok I), keterangan pencacahan (blok II), ringkasan (blok III), keterangan demografi (blok IV), keterangan imigrasi, akta kelahiran dan Pendidikan (blok V), pengeluaran (blok VI), rekapitulasi pengeluaran (blok VII), pendapatan dan penerimaan (blok VIII).

2.3.3. Entri Data

Entri data dilakukan di setiap kelurahan wilayah survei. *Form* entri data dibuat menggunakan program EpiData (*open source*). Penggunaan EpiData untuk entri data dilakukan karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh EpiData. Kelebihan dari EpiData antara lain ukurannya kecil, mudah dioperasikan, tampilannya sesuai dengan kuesioner dan ada fasilitas penyaringan (*filter*). Untuk menjamin kualitas data yang dientri pun, program EpiData melakukan penyaringan-penyaringan, sehingga data-data entri yang mungkin tidak akurat karena human *error* tidak dapat diterima (tidak terisi) oleh program ini. Karena ukurannya yang kecil, hasil entri dari program EpiData ini

juga sangat memudahkan pengiriman data dari kelurahan ke server pusat melalui jaringan internet. Untuk selanjutnya, data hasil entri kiriman dari seluruh kelurahan digabung di pusat.

2.4. Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan data *cleaning*. Data *cleaning* dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan yang masih terjadi dalam proses entri data yang masih lolos dari penyaringan-penyaringan yang dilakukan program tersebut. Setelah data benar-benar telah dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan meliputi statistika deskriptif, pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kota, dan pendugaan tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kecamatan. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SAS dan R.

2.4.1. Statistika Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat responden secara umum dari sisi faktor-faktor penentuan Indeks Pembangunan Manusia. Penyajian hasil analisis menggunakan tabel-tabel frekuensi dan grafik yang memudahkan diperoleh informasi mengenai pola kondisi masyarakat.

2.4.2. Pendugaan Langsung Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kota

Untuk melakukan pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat Kota, memanfaatkan data faktor-faktor yang diteliti dari objek survei rumah tangga yang telah diambil sampel. Pendugaan ini dilakukan secara langsung dari data survei yang diperoleh.

2.4.3. Pendugaan Tidak Langsung IPM Tingkat Kecamatan Melalui Metode *Small Area Estimation* (SAE)

Untuk melakukan pendugaan tak langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kecamatan, memanfaatkan data faktor-faktor yang diteliti dari objek survei rumah tangga yang telah diambil sampel dan data sekunder dari data potensi desa (BPS). Metode yang digunakan ialah *small area estimation* (SAE)

yang pada dasarnya memanfaatkan informasi dari data yang tersurvei serta data lain di luar survei yang dapat menunjang hasil penelitian.

Pendugaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kecamatan tidak dapat dilakukan menggunakan metode pendugaan langsung (*direct estimation*) dengan data Susenas BPS. Hal ini berkaitan dengan jumlah sampel Susenas yang memang dirancang mencapai tingkat akurat pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi tersebut maka pendugaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kecamatan harus menggunakan metode pendugaan tak langsung (*indirect estimation*). Metode ini memanfaatkan data faktor-faktor yang diteliti dari objek survei rumah tangga yang telah diambil menjadi sampel Susenas dan data sekunder dari data Podes BPS. Pendekatan pemodelan yang sesuai untuk kepentingan tersebut adalah metode *Small Area Estimation* (SAE). Pada dasarnya SAE memanfaatkan informasi dari data yang tersurvei serta data lain di luar survei yang dapat meningkatkan akurasi pemodelan.

Ukuran contoh pada sub-area survei yang berukuran kecil akan mengakibatkan statistik yang diperoleh memiliki ragam yang besar atau bahkan pendugaan bisa saja tidak dapat dilakukan pada sub-area tertentu karena sub-area tersebut tidak terpilih menjadi contoh. Metode pendugaan area kecil (*small area estimation*, SAE) dikembangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Area kecil tersebut didefinisikan sebagai himpunan bagian dari populasi di mana suatu peubah menjadi perhatian (Rao *et.al.* 2014; Chambers *et.al.* 2014; Fabrizi *et.al.* 2014; Prendergast dan Sheather 2013; Alfons *et.al.* 2013; Salvati *et.al.* 2012; Zhang dan Hagesaether 2011; Haslett dan Jones 2010; Sinha dan Rao 2009; Lahiri 2008; Russo *et.al.* 2005; Rao 2003).

Informasi tambahan dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dan presisi suatu penduga. Pada SAE, informasi tambahan tersebut dapat berupa nilai parameter dari area kecil lain yang memiliki karakteristik serupa dengan area kecil yang menjadi perhatian, atau nilai pada waktu yang lalu, atau nilai dari peubah yang memiliki hubungan dengan peubah yang sedang diamati. Pendugaan parameter dan inferensinya yang berdasarkan pada informasi tambahan tersebut, dinamakan pendugaan tidak langsung atau *model-based*.

Metode dengan memanfaatkan informasi tambahan tersebut secara statistik memiliki sifat penguatan (*borrowing strength*) dari hubungan antara nilai peubah respons dan informasi tambahan tersebut (Rao *et.al.* 2014; Chamber *et.al.* 2014; Salvati *et.al.* 2012; Tanton *et.al.* 2011; Tzadivis *et.al.* 2010; Haslett dan Jones 2010).

Pendugaan tidak langsung dapat menggunakan pendekatan model secara umum. Misalkan diasumsikan bahwa $q_i = g(Y_i)$ untuk beberapa spesifikasi $g(\cdot)$ dihubungkan dengan data penyerta spesifik pada area i , $\mathbf{x}_i = (x_{1i}, \dots, x_{pi})^T$ melalui suatu model linear

$$q_i = \mathbf{x}_i^T \mathbf{b} + b_i v_i, \quad i = 1, \dots, m$$

di mana b_i adalah konstanta positif yang diketahui dan $\mathbf{b}$ adalah vektor berukuran $p \times 1$. Sedangkan v_i adalah pengaruh acak spesifikasi area yang diasumsikan bebas dan menyebar identik dengan $E_m(v_i) = 0$ dan $V_m(v_i) = s_v^2$ ($\neq 0$), atau $v_i \sim \text{iid}(0, s_v^2)$. Pendugaan tidak langsung untuk rata-rata populasi di area kecil i , (Y_i), diperlukan informasi mengenai penduga langsungnya yaitu $\hat{Y}$. Dengan menggunakan metode James-Stein akan diperoleh:

$$\theta_i = \mathbf{x}_i^T \mathbf{b} + b_i v_i + e_i, \quad i = 1, \dots, m$$

di mana galat penarikan contoh (*sampling error*) e_i adalah bebas dengan $E_p(e_i | q_i) = 0$ dan $V_p(e_i | q_i) = y_i$, atau $v_i \sim \text{iid}(0, s_v^2)$.

Fabrizi *et.al.* (2014) dan Tzadivis *et.al.* (2010) mengaitkan model-model pendugaan tidak langsung (*model-based*) di atas sebagai bagian dari model campuran linear terampat (*generalized linear mixed model*, GLMM) yang menggabungkan antara pengaruh tetap dan pengaruh acak dalam suatu model umum. Sinha dan Rao (2009) mengemukakan formulasi model GLMM sebagai berikut :

$$\mathbf{y}^p = \mathbf{X}^p \mathbf{b} + \mathbf{Z}^p \mathbf{v} + \mathbf{e}^p.$$

Pada model ini $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{e}^p$ bebas dengan $\mathbf{e}^p \sim \mathbf{N}(\mathbf{0}, s^2 \mathbf{y}^p)$ dan $\mathbf{v} \sim \mathbf{N}(\mathbf{0}, s^2 \mathbf{D}(\mathbf{I}))$, di mana $\mathbf{y}^p$ adalah matriks definit positif yang diketahui dan $\mathbf{D}(\mathbf{I})$ adalah matriks definit positif yang strukturnya diketahui. Sedangkan $\mathbf{X}^p$ dan $\mathbf{Z}^p$ adalah matriks rancangan dan $\mathbf{Y}^p$ adalah vektor $N \times 1$ dari nilai y populasi. Matriks koragam bagi

$\mathbf{v}$ dan $\mathbf{e}$ masing-masing adalah $\mathbf{G}$ dan $\mathbf{R}$. Pada GLMM ini dilakukan pendugaan terhadap kombinasi linear dari parameter yaitu $\mathbf{m} = \mathbf{1}^T \mathbf{b} + \mathbf{m}^T \mathbf{v}$. Lahiri (2008) dan Rao (2003) mengemukakan bahwa untuk $\mathbf{d}$ tertentu yang diketahui maka penduga bagi $\mathbf{m}$ adalah

$$\tilde{\mu}^H = t(\mathbf{d}, \mathbf{y}) = \mathbf{1}^T \tilde{\beta} + \mathbf{m}^T \tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{1}^T \tilde{\beta} + \mathbf{m}^T \mathbf{GZ}^T \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X} \tilde{\beta})$$

Model untuk pendugaan tidak langsung, yaitu $\theta_i = \mathbf{x}_i^T \mathbf{b} + b_i v_i + e_i$, $i = 1, \dots, m$, sebenarnya merupakan kasus khusus dari model GLMM, yaitu

$$\mathbf{y}_i = \theta_i, \quad \mathbf{X}_i = \mathbf{x}_i^T, \quad \mathbf{Z}_i = b_i$$

dan

$$\mathbf{v}_i = v_i, \quad \mathbf{e}_i = e_i, \quad \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_p)^T, \quad \mathbf{G}_i = s_v^2, \quad \mathbf{R}_i = y_i$$

Apabila persamaan pendugaan tidak langsung disubstitusikan ke dalam pendugaan GLMM akan diperoleh penduga bagi m_i atau q_i yaitu:

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}^H &= \mathbf{x}_i^T \tilde{\beta} + g_i (\hat{v}_i - \mathbf{x}_i^T \tilde{\mathbf{v}}), \text{ di mana } g_i = s^2 b_i^2 / (y_i + s^2 b_i^2), \text{ dan} \\ \tilde{\beta} &= \tilde{\beta}_{(s_v^2)} = \begin{bmatrix} m & \mathbf{X} \mathbf{X}^T \\ \sum_i \Psi \frac{i}{\sigma^2 b^2} & \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} m & \mathbf{X} \tilde{\theta} \\ \sum_i \Psi \frac{i}{\sigma^2 b^2} & \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ada tiga pendekatan standar untuk SAE didasarkan pada model GLMM tersebut, yaitu penduga tak-bias linear terbaik (*best linear unbiased estimator*, BLUE), Bayes empirik, dan Bayes berhierarki. BLUE tersebut biasanya membutuhkan metode kemungkinan maksimum terkendala (*restricted maximum likelihood*) untuk pendugaan parameternya yang berkaitan dengan pengaruh area acak, yang identik dengan Bayes empirik dan Bayes berhierarki dalam beberapa keadaan.

2.5. Kebutuhan Data untuk Penghitungan IPM Level Kecamatan

Perhitungan IPM memerlukan berbagai sumber data relevan yang secara umum dirumuskan dalam Tabel 4.

Tabel 4 Sumber Data dalam Pengukuran IPM

No.	Komponen IPM/Atribut	Sumber Data
1	Angka Harapan Hidup	Proyeksi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data primer
2	Rata-rata Lama Sekolah	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta <i>auxiliary variable</i>
3	Harapan Lama Sekolah	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta <i>auxiliary variable</i> serta faktor koreksi pesantren
4	Pengeluaran per kapita	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta <i>auxiliary variable</i> (pendekatan lognormal distribution)

IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu regional berdasarkan tiga aspek utama yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup. Dimensi atau indikator pembentuk IPM adalah

- Kesehatan : Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir
- Pengetahuan : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Standar hidup : Pengetahuan per Kapita

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) tahun 2020. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang

bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Indeks pembangunan manusia diperhitungkan dari persamaan-persamaan berikut :

Perubahan Metodologi IPM

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- b. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- c. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan tersebut meliputi:

- a. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah .
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

- c. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan metode baru tersebut adalah penggunaan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif):

- a. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- b. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Penggunaan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Menghitung Indeks Komponen

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Implementasi Ipm Metode Baru di Indonesia

- a. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 dan 2020, Proyeksi Penduduk)
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.
- d. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik		Rata-rata Geometrik	
	$IPM = \frac{1}{3}(I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}) \times 100$		$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Variabel dalam IPM Metode Baru:

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy* - LE)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling* - MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling* - EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan

makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Penghitungan Paritas Daya Beli

Dihitung dari bundel komoditas makanan dan nonmakanan.



Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

Pengelompokan IPM

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

IPM < 60 : IPM rendah

60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang

70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi

IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi

$$\Rightarrow I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

$$\Rightarrow I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{RLS}} + I_{\text{HLS}}}{2} \begin{cases} I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \\ I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

BAB III INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN KOTA DEPOK

3.1. Urgensi IPM

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Begitu pentingnya dimensi “manusia” dalam pembangunan, pembangunan manusia menjadi prioritas utama melalui penerapan berbagai strategi pembangunan yang penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan manusia menurut UNDP (1990), adalah proses memperluas pilihan- pilihan penduduk (*Enlarging the choices of people*). Terdapat tiga pilihan dari sekian banyak pilihan yang dianggap relevan, yaitu sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan berkemampuan untuk akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Dengan demikian jelas bahwa pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan) bukan satu-satunya pilihan agar manusia dapat hidup sejahtera dan menjadi manusia yang berkualitas.

Untuk mengukur ketiga pilihan utama tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter. Ketiga parameter tersebut adalah: Pertama, derajat kesehatan dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup (*life expectancy rate*), mengukur keadaan sehat dan umur panjang. Kedua, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah, mengukur manusia yang cerdas, terampil, terdidik dan bertaqwa. Ketiga, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*); mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat Kota Depok memiliki peran penting dalam mengevaluasi dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Berikut adalah kegunaan IPM sebagai indikator pembangunan di tingkat Kota Depok:

1. Mengukur Kualitas Hidup Penduduk Kota Depok

IPM memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup di Kota Depok, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (ekonomi). Dengan IPM, pemerintah kota dapat memahami bagaimana kesejahteraan penduduk berkembang, serta melihat area yang membutuhkan perhatian khusus.

2. Memantau Kemajuan Pembangunan Daerah

IPM Kota Depok dapat digunakan untuk menilai apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tren peningkatan IPM menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif, sementara penurunan atau stagnasi IPM mengindikasikan bahwa perbaikan atau intervensi tambahan diperlukan.

3. Identifikasi Kesenjangan Antarwilayah di Dalam Kota Depok

IPM dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pembangunan manusia di berbagai wilayah di dalam Kota Depok. Misalnya, daerah pinggiran mungkin memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pusat Kota Depok. Hal ini memungkinkan pemerintah Kota Depok untuk menargetkan intervensi di wilayah yang tertinggal, sehingga pembangunan lebih merata.

4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok

IPM Kota Depok dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lokal. Jika indikator kesehatan, pendidikan, atau pendapatan meningkat, ini menunjukkan bahwa program-program terkait di bidang tersebut berhasil. Sebaliknya, IPM yang stagnan atau menurun menjadi sinyal bahwa kebijakan harus diperbaiki.

5. Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Dengan menggunakan data IPM, Pemerintah Kota Depok dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdasarkan bukti. Misalnya, jika dimensi pendidikan dalam IPM Kota Depok rendah, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran dan program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

6. Alokasi Sumber Daya yang Lebih Tepat

IPM membantu Pemerintah Kota Depok dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien. Misalnya, daerah yang memiliki IPM rendah di sektor kesehatan dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, infrastruktur rumah sakit, atau kampanye kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pengeluaran publik bisa diarahkan ke sektor yang paling membutuhkan.

7. Membandingkan Kinerja Kota Depok

IPM juga memungkinkan perbandingan antar kota dalam satu negara atau wilayah. Pemerintah daerah dapat menggunakan IPM untuk

membandingkan kinerja pembangunan mereka dengan kota lain, mempelajari kebijakan yang berhasil di daerah lain, dan menerapkan praktik terbaik yang relevan dengan kondisi setempat.

8. Pemantauan Pembangunan Berkelanjutan

Di tingkat Kota Depok, IPM juga berfungsi sebagai indikator untuk memantau kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya, kota yang ingin fokus pada peningkatan standar hidup dapat memantau apakah pendapatan per kapita meningkat seiring dengan perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan, menciptakan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

9. Dasar untuk Kebijakan Inklusif

IPM membantu Kota Depok dalam merancang kebijakan yang inklusif dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan menganalisis IPM berdasarkan gender, kelompok sosial, atau lokasi, pemerintah dapat mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan kebijakan yang lebih adil.

10. Mendorong Partisipasi Publik

Ketika IPM digunakan secara terbuka oleh Pemerintah Kota Depok, masyarakat dapat lebih memahami kondisi pembangunan di kotanya dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Data IPM dapat mendorong diskusi yang lebih luas di kalangan warga tentang prioritas pembangunan, kebutuhan lokal, dan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dari hasil kegiatan Analisis IPM Tahun 2024 dapat menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Depok, sehingga data Analisis IPM Tahun 2024 dapat dipergunakan untuk menghitung IPM Kota Depok Tahun 2024. Namun demikian angka IPM Kota Depok ini masih bersifat sementara karena penghitungan secara nasional dilakukan pada tahun setelahnya.

Tabel 5 menunjukkan IPM Kota Depok Tahun 2024 meningkat apabila

dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 82,98. Angka Harapan Hidup Kota Depok sebesar 75,84 tahun yang artinya anak yang lahir pada tahun 2024 ini mempunyai harapan hidup sampai dengan umur 75,84 tahun. Rata-rata lama sekolah 11,63 tahun artinya masyarakat Kota Depok yang berumur 25 tahun keatas rata-rata lama sekolah selama 11,63 tahun atau sampai dengan kelas 2 SMA.

Rata-rata harapan lama sekolah penduduk berumur 7 tahun ke atas sebesar 13,97 tahun artinya penduduk berumur 7 tahun ke atas mempunyai harapan akan bersekolah sampai dengan tingkat 2 di perguruan tinggi. Pengeluaran per kapita sebesar Rp. 16.648.000,00 per tahun artinya bahwa masyarakat Kota Depok tahun 2024 mengeluarkan uang untuk konsumsi sebesar Rp. 16.648.000,00 setiap orang selama satu tahun yang telah disesuaikan.

Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2019 – 2024

Tahun	IPM	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)
2019	80,82	74,18	14,34	10,91	15.292
2020	81,14	74,8	13,92	11,28	15.281
2021	81,54	74,97	13,93	11,46	15.420
2022	82,02	75,24	13,94	11,47	15.926
2023	82,53	75,53	13,96	11,58	16.279
2024*	82,98	75,84	13,97	11,63	16.648

Angka Tahun 2024 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i).Data Susenas dan Podes BPS dan (ii).Data hasil survei lapangan oleh Tim.

Tugas pemerintah dan masyarakat Kota Depok semakin bertambah berat untuk meningkatkan angka IPM ini di tahun-tahun mendatang. Masih diperlukan kerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Jangan sampai terjadi di Kota Depok

yang mempunyai IPM tinggi di Jawa Barat tetapi masih hal-hal yang tidak mencerminkan hal di atas seperti putus sekolah, ketidakberdayaan masyarakat dalam berobat, dan lain-lain. Mereka adalah harapan di masa depan yang harus kita perjuangkan di masa kini. Modal sosial dan kerja sama yang baik dari semua pihak sangat diharapkan untuk membangun Kota Depok yang tercinta ini.

3.3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup di sebelas kecamatan di Kota Depok sangat bervariasi sebagaimana terlihat dalam Tabel 6. Walaupun secara umum sudah mencapai tingkat harapan hidup yang tinggi. Secara keseluruhan Kota Depok mempunyai angka harapan hidup waktu lahir di tahun 2024 sebesar 75,84 tahun. Artinya warga Kota Depok yang lahir di tahun 2024 mempunyai harapan hidup lebih dari 75,84 tahun.

Tingginya angka harapan hidup di Kota Depok sangat ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan pelayanan prima dari petugas kesehatan serta ditunjang dengan adanya BPJS Kesehatan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok di masa yang akan datang.

Tabel 6 Angka Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Beji	72,08	72,21	72,24	72,26	74,28	75,23
2	Bojongsari	71,7	71,83	71,86	71,88	73,18	73,28
3	Cilodong	76,42	76,55	76,59	76,62	78,17	78,31
4	Cimanggis	76,57	76,7	76,75	76,78	78,27	78,43
5	Cinere	74,58	74,71	74,75	74,78	78,35	78,47
6	Cipayung	70,49	70,61	70,65	70,66	72,57	72,67
7	Limo	72,07	72,2	72,23	72,25	74,16	74,26
8	Pancoran Mas	71,1	71,22	71,26	71,27	75,62	75,92

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
9	Sawangan	70,62	70,74	70,78	70,79	73,79	73,89
10	Sukmajaya	77,41	77,55	77,59	77,62	79,29	79,42
11	Tapos	72,18	72,31	72,35	72,37	72,7	72,8
Kota Depok		74,18	74,8	74,97	75,24	75,53	75,84

Angka Tahun 2024 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i).Data Susenas dan Podes BPS dan (ii).Data hasil survei lapangan oleh Tim.

Angka Harapan Hidup (AHH) kecamatan yang paling tinggi adalah umur harapan hidup di Kecamatan Sukmajaya sebesar 79,42 dan yang paling rendah adalah umur harapan hidup di Kecamatan Cipayung sebesar 72,67. Dari umur harapan hidup ini maka Pemerintah Kota Depok dapat menetapkan prioritas kesehatan di Kecamatan Cipayung tanpa meninggalkan kecamatan yang lain.

Kemajuan atau peningkatan umur harapan hidup di setiap kecamatan sangat ditunjang oleh adanya peningkatan di bidang kesehatan. Masyarakat sangat mengharapkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah mungkin dengan menggiatkan program Posyandu dan RW siaga. Posyandu merupakan kepanjangan tangan pemerintah di bidang kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan giatnya kegiatan Posyandu diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan sedini mungkin.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap umur harapan hidup adalah faktor kebersihan lingkungan dan kelengkapan sarana yang menunjang, seperti misalnya ketersediaan jamban keluarga dan tempat pembuangan sampah akhir yang jauh dari pemukiman tempat tinggal. Usaha untuk menjaga kebersihan ini hendaknya diajarkan sedini mungkin di rumah dan di sekolah-sekolah kepada murid-murid misalnya dengan pemilahan sampah.

Kondisi yang mengurangi derajat kesehatan masyarakat perkotaan yang tidak kalah penting adalah terpaparnya polusi asap kendaraan bermotor. Alangkah sehatnya apabila udara di Kota Depok bebas dari polusi udara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Depok antara lain dengan

pembatasan kendaraan bermotor yang berpolusi dengan adanya Uji Emisi gas buang kendaraan. Apabila hal ini sudah terlaksana bisa lebih ditingkatkan lagi.

3.4. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah untuk masyarakat Kota Depok berumur 25 tahun ke atas tahun 2024 terlihat pada Tabel 7. Rata-rata lama sekolah yang tertinggi ada di Kecamatan Sukmajaya mencapai 12,36 tahun artinya rata-rata sudah masuk kuliah. Kecamatan yang mencapai rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi selanjutnya adalah Cinere yaitu mendekati 12,16 tahun artinya lama sekolah penduduk yang berumur 25 tahun ke atas sampai dengan kelas 12 atau kelas 3 SLTA. Sementara terendah angka rata-rata lama sekolah ada di Kecamatan Cipayung. Rata-rata lama sekolah di kecamatan tersebut sekitar 10,65 tahun atau hampir sampai dengan kelas 2 SLTA.

Secara umum angka rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kota Depok adalah sampai dengan kelas 2 SLTA. Hal ini bisa menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok untuk dapat menetapkan prioritas pendidikan dengan lebih memudahkan masyarakat misalnya pendidikan gratis sampai dengan SLTA sebab jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Depok sangat tidak sebanding dengan banyaknya murid yang harus sekolah sementara sekolah di SLTA swasta memerlukan dana yang cukup bahkan mungkin mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil. Namun sekarang dengan adanya berbagai bantuan pendidikan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Depok.

Tabel 7 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Beji	10,82	10,72	10,81	10,84	11,23	11,65
2	Bojongsari	10,52	10,43	10,52	10,55	11,09	11,17
3	Cilodong	11,62	11,51	11,6	11,64	11,72	11,8
4	Cimanggis	11,88	11,76	11,85	11,89	11,91	11,98

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
5	Cinere	13,25	13,1	13,2	13,24	12,05	12,16
6	Cipayung	11,07	10,97	11,06	11,08	10,57	10,65
7	Limo	11,71	11,59	11,68	11,71	11,18	11,26
8	Pancoran Mas	11,15	11,05	11,14	11,16	11,24	11,72
9	Sawangan	10,65	10,56	10,65	10,67	11,1	11,18
10	Sukmajaya	12,02	11,9	11,99	12,03	12,25	12,36
11	Tapos	11,96	11,84	11,93	11,96	10,83	10,91
Kota Depok		10,91	11,28	11,46	11,47	11,58	11,63

Angka Tahun 2024 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i).Data Susenas dan Podes BPS dan (ii).Data hasil survei lapangan oleh Tim.

3.5. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Kota Depok tahun 2024 sebesar 13,97, artinya penduduk Depok diharapkan dapat bersekolah selama 13,97 tahun atau sampai dengan Diploma II. Angka harapan lama sekolah senantiasa naik meskipun sedikit dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Demikian halnya pada tiap kecamatan juga naik dari tahun 2019 hingga tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan Tabel 8. Harapan lama sekolah tertinggi ada di Kecamatan Sukmajaya sebesar 14,66 atau hampir Sarjana/Diploma IV, disusul Kecamatan Cinere yaitu 14,59 atau hampir Sarjana/Diploma IV dan Kecamatan Cimanggis sebesar 14,47 atau hampir Sarjana/Diploma IV. Sementara itu harapan lama sekolah terendah ada di Kecamatan Cipayung sebesar 13,03 atau Diploma I, disusul Kecamatan Tapos sebesar 13,59 atau hampir Diploma I.

Tabel 8 Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Beji	13,79	13,88	13,97	14,06	14,27	14,28
2	Bojongsari	13,45	13,54	13,63	13,72	13,93	13,94
3	Cilodong	13,86	13,95	14,04	14,13	14,34	14,35

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
4	Cimanggis	13,98	14,07	14,16	14,25	14,46	14,47
5	Cinere	14,1	14,19	14,28	14,37	14,58	14,59
6	Cipayung	12,54	12,63	12,72	12,81	13,02	13,03
7	Limo	13,77	13,86	13,92	13,94	13,95	13,96
8	Pancoran Mas	13,84	13,93	14,02	14,11	14,32	14,33
9	Sawangan	13,71	13,8	13,87	13,9	13,92	13,95
10	Sukmajaya	14,17	14,26	14,35	14,44	14,65	14,66
11	Tapos	13,1	13,19	13,28	13,37	13,58	13,59
Kota Depok		13,91	13,92	13,93	13,94	13,96	13,97

Angka Tahun 2024 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i).Data Susenas dan Podes BPS dan (ii).Data hasil survei lapangan oleh Tim.

3.6. Pengeluaran Perkapita dan Alokasi Tabungan

Pengeluaran Perkapita disesuaikan di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.648.000,00 perkapita per tahun. Kecamatan Sukmajaya adalah kecamatan dengan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan penduduknya paling besar yaitu sebesar Rp. 21.057.000,00 dan yang terkecil sebesar Rp. 12.028.000,00 yang berada di Kecamatan Cipayung sebagaimana ditunjukkan Tabel 9. Daya beli masyarakat Kecamatan Sukmajaya yang tertinggi tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan keseluruhan penduduk Sukmajaya. Ketimpangan pendapatan antar penduduk belum bisa dilihat dengan angka ini. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat ketimpangan pendapatannya misalnya dengan menghitung *Gini Ratio*.

Tabel 9 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2024 (dalam Rp. Ribu)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Beji	15.770	16.404	16.544	16.563	17.176	17.492
2	Bojongsari	12.530	13.077	13.209	13.225	13.832	14.136
3	Cilodong	12.671	13.222	13.354	13.370	18.088	18.401

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
4	Cimanggis	16.884	17.548	17.691	17.712	18.325	18.649
5	Cinere	21.384	22.170	22.324	22.350	20.647	20.967
6	Cipayung	10.486	10.978	11.104	11.117	11.724	12.028
7	Limo	13.969	14.554	14.689	14.706	15.313	15.619
8	Pancoran Mas	16.654	17.312	17.454	17.475	17.680	17.984
9	Sawangan	12.968	13.526	13.659	13.675	13.977	14.282
10	Sukmajaya	19.138	19.862	20.010	20.034	20.763	21.057
11	Tapos	11.218	11.729	11.857	11.871	12.478	12.773
Kota Depok		15.292	15.281	15.420	15.926	16.279	16.648

Angka Tahun 2024 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i).Data Susenas dan Podes BPS dan (ii).Data hasil survei lapangan oleh Tim.

Pengeluaran dan tabungan masyarakat merupakan dua indikator penting dalam ekonomi yang membantu memahami perilaku ekonomi suatu negara atau masyarakat. Berikut penjelasannya:

a. Pengeluaran Masyarakat

Pengeluaran masyarakat mencerminkan seberapa banyak uang yang dihabiskan oleh individu atau rumah tangga untuk barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari (misalnya makanan, pakaian, dan hiburan) dan pengeluaran investasi (seperti pembelian properti atau aset).

Fungsi Pengeluaran dalam Ekonomi:

- **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Pengeluaran yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang baik dan cenderung memacu produksi barang dan jasa. Semakin banyak masyarakat membelanjakan uangnya, semakin tinggi tingkat permintaan terhadap produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- **Indikator Kesehatan Ekonomi:** Pengeluaran masyarakat dapat menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi. Jika masyarakat merasa yakin terhadap stabilitas ekonomi, mereka cenderung lebih banyak berbelanja. Sebaliknya, jika ketidakpastian ekonomi tinggi, masyarakat mungkin mengurangi pengeluaran mereka.

b. Tabungan Masyarakat

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menabung untuk berbagai tujuan, seperti menyimpan dana darurat, berinvestasi di masa depan, atau menyiapkan dana pensiun.

Peran Tabungan dalam Ekonomi:

- **Sumber Investasi:** Tabungan yang ditempatkan di bank atau lembaga keuangan lainnya akan digunakan kembali sebagai dana investasi. Bank dapat meminjamkan uang tersebut kepada pengusaha atau sektor lain yang membutuhkan dana untuk investasi, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.
- **Penunjang Stabilitas Ekonomi Individu:** Tabungan membantu masyarakat mengelola risiko keuangan pribadi, terutama dalam menghadapi situasi darurat atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dengan memiliki tabungan, masyarakat cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau inflasi.

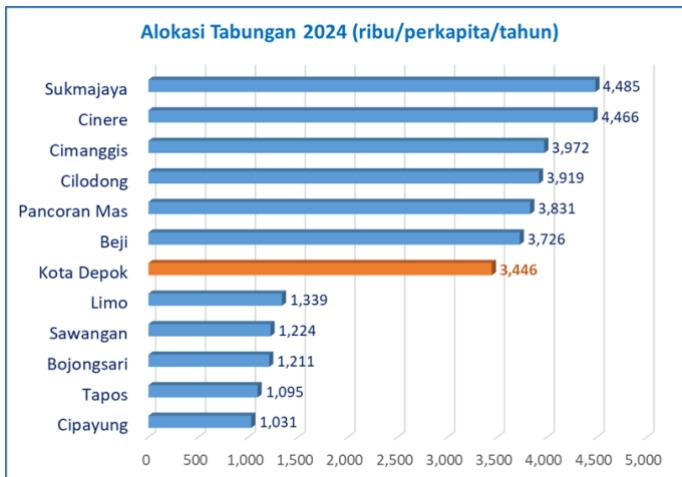
Hubungan antara Pengeluaran dan Tabungan:

- **Trade-off:** Pengeluaran dan tabungan biasanya memiliki hubungan terbalik. Jika seseorang memutuskan untuk lebih banyak menabung, pengeluaran konsumsi mereka akan berkurang. Sebaliknya, jika pengeluaran meningkat, porsi yang dapat ditabung akan menurun.
- **Faktor Pengaruh:** Tingkat suku bunga, inflasi, dan pendapatan memengaruhi keputusan masyarakat untuk menabung atau membelanjakan uang. Ketika suku bunga tinggi, orang cenderung lebih

banyak menabung karena pengembalian yang lebih tinggi dari tabungan mereka.

Secara keseluruhan, keseimbangan antara pengeluaran dan tabungan dalam masyarakat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara. Jika pengeluaran terlalu rendah, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Namun, jika tabungan terlalu sedikit, ini bisa menunjukkan ketidakstabilan keuangan jangka panjang.

Rata-rata alokasi tabungan (dalam ribu/perkapita/tahun) disajikan pada Gambar 4. Rata-rata alokasi tabungan untuk Kota Depok tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.446.000,00 perkapita pertahun. Ada 6 kecamatan nilainya lebih besar dari Kota Depok, yaitu Beji, Pancoran Mas, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Sukmajaya. Sementara itu ada 5 kecamatan nilainya lebih kecil dari Kota Depok, yaitu Cipayung, Tapos, Bojongsari, Sawangan, Limo.



Gambar 4 Alokasi Tabungan (dalam ribu/perkapita/tahun)

3.7. Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok

Tabel 10 menyajikan Indeks Pembangunan Manusia per kecamatan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. IPM Kota Depok Tahun 2024 naik apabila

dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 82,98. Namun demikian angka IPM Kota Depok ini masih bersifat sementara karena penghitungan secara nasional dilakukan pada tahun setelahnya.

Nilai IPM tertinggi ada di Kecamatan Sukmajaya sebesar 88,65 disusul Kecamatan Cinere yaitu 88,25 dan Kecamatan Cimanggis sebesar 86,36. Sementara itu nilai IPM terendah ada di Kecamatan Cipayung sebesar 77,02 disusul Kecamatan Tapos yang terendah kedua sebesar 79,07.

Tabel 10 Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok
Tahun 2019 – 2024

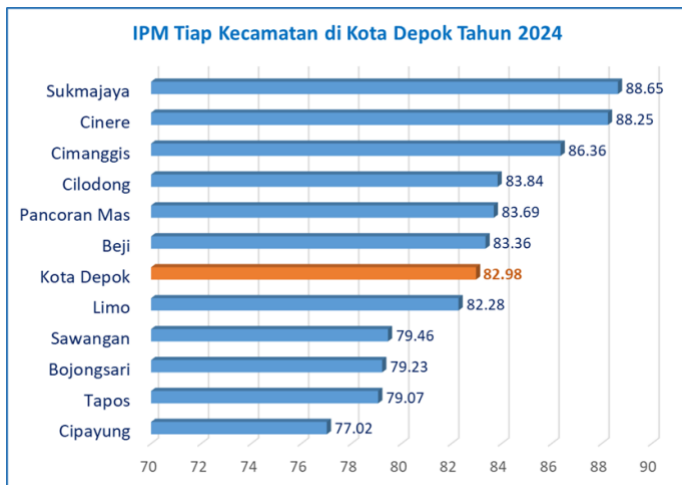
No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Beji	81,51	81,71	81,81	81,85	82,67	83,36
2	Bojongsari	77,56	77,76	77,86	77,87	78,61	79,23
3	Cilodong	82,05	82,26	82,36	82,4	83,22	83,84
4	Cimanggis	84,58	84,79	84,9	84,92	85,74	86,36
5	Cinere	86,46	86,67	86,78	86,8	87,62	88,25
6	Cipayung	75,36	75,55	75,65	75,66	76,4	77,02
7	Limo	80,58	80,78	80,88	80,92	81,66	82,28
8	Pancoran Mas	81,9	82,11	82,21	82,25	83,07	83,69
9	Sawangan	77,79	77,99	78,09	78,1	78,84	79,46
10	Sukmajaya	86,87	87,08	87,19	87,21	88,03	88,65
11	Tapos	77,35	77,55	77,65	77,66	78,4	79,07
Kota Depok		80,82	81,14	81,54	82,02	82,53	82,98

Angka Tahun 2024 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i).Data Susenas dan Podes BPS dan (ii).Data hasil survei lapangan oleh Tim.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pembangunan manusia di berbagai wilayah di dalam Kota Depok. Misalnya, daerah pinggiran mungkin memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pusat Kota Depok. Hal ini memungkinkan Pemerintah Kota Depok untuk menargetkan intervensi di wilayah yang tertinggal, sehingga pembangunan lebih merata.

Perbandingan IPM antar kecamatan di Kota Depok disajikan pada Gambar 5. IPM Kota Depok Tahun 2024 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 82,98. Ada 6 kecamatan nilai IPM-nya lebih besar dari Kota Depok, yaitu Beji, Pancoran Mas, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Sukmajaya. Sementara itu ada 5 kecamatan nilai IPM-nya lebih kecil dari Kota Depok, yaitu Cipayung, Tapos, Bojongsari, Sawangan, Limo.



Gambar 5 IPM Tiap Kecamatan di Kota Depok Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas hidup suatu wilayah, termasuk Kota Depok. Untuk meningkatkan nilai IPM Kota Depok, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berikut adalah beberapa strategi untuk

meningkatkan nilai IPM di Kota Depok:

1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan

- Akses Pendidikan yang Merata: Pastikan semua anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, termasuk anak-anak di daerah terpencil atau kurang mampu.
- Peningkatan Fasilitas Pendidikan: Bangun dan renovasi sekolah, serta lengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung proses belajar mengajar.
- Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik: Tingkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu menghadirkan metode pembelajaran yang lebih efektif.
- Program Beasiswa: Perluas program beasiswa bagi siswa berprestasi atau siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendorong partisipasi pendidikan.

2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Akses Kesehatan yang Terjangkau: Sediakan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
- Kampanye Hidup Sehat: Adakan kampanye kesehatan seperti penyuluhan gizi, olahraga, dan pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit menular dan penyakit kronis.
- Fasilitas Kesehatan Ibu dan Anak: Fokus pada kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.
- Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar: Pastikan layanan kesehatan dasar (seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan program pencegahan) berjalan efektif.

3) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

- Pengembangan UMKM: Dorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar

yang lebih luas.

- Penciptaan Lapangan Kerja: Fasilitasi penciptaan lapangan kerja, terutama bagi angkatan kerja muda, dengan memfasilitasi pelatihan kerja dan program kewirausahaan.
- Perbaikan Infrastruktur: Bangun infrastruktur publik seperti transportasi, air bersih, dan listrik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
- Subsidi dan Bantuan Sosial: Berikan bantuan sosial yang tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli.

4) Mengatasi Masalah Kemiskinan

- Program Pengentasan Kemiskinan: Implementasikan program pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal bagi keluarga miskin.
- Peningkatan Akses terhadap Perumahan Layak: Pastikan masyarakat miskin mendapatkan akses ke perumahan yang layak dan sehat dengan program rumah murah atau subsidi perumahan.

5) Perbaikan Sistem Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

- Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar program-program pembangunan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi program pembangunan.

6) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan: Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Program Pemberdayaan Masyarakat: Luncurkan program-program

pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan literasi keuangan, untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Dengan langkah-langkah strategi ini, Kota Depok dapat meningkatkan nilai IPM-nya secara bertahap melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakatnya. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci sukses dalam implementasi program-program tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dapat pula menjadi indikator untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Namun untuk menyikapi data IPM dan komponennya tidak bisa secara parsial sehingga menghasilkan kebijakan yang salah.

IPM Kota Depok Tahun 2024 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 82,98. Angka Harapan Hidup Kota Depok sebesar 75,84 tahun yang artinya anak yang lahir pada tahun 2024 ini mempunyai harapan hidup sampai dengan umur 75,84 tahun. Rata-rata lama sekolah 11,63 tahun artinya masyarakat Kota Depok yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata lama sekolah selama 11,63 tahun atau sampai dengan kelas 2 SMA.

Rata-rata harapan lama sekolah penduduk berumur 7 tahun ke atas sebesar 13,97 tahun artinya penduduk berumur 7 tahun ke atas mempunyai harapan akan bersekolah sampai dengan tingkat 2 di perguruan tinggi. Pengeluaran per kapita sebesar Rp. 16.648.000,00 per tahun artinya bahwa

masyarakat Kota Depok tahun 2024 mengeluarkan uang untuk konsumsi sebesar Rp. 16.648.000,00 setiap orang selama satu tahun yang telah disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan komponen dari IPM tidak serta merta mengindikasikan bahwa daerah dengan AHH lebih tinggi, tingkat polusi daerah tersebut lebih rendah daripada daerah dengan AHH lebih rendah. Mobilitas penduduk yang sangat besar memberi arti bahwa penduduk tersebut tidak sepanjang hari bermukim di tempat tinggal mereka.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun penduduk usia 7 tahun ke atas menjalani pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Depok.

Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesehatan Gender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator-indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok, setiap kecamatan di Kota Depok perlu memperbaiki kualitas dari setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah yang harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan, hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi maka penyusun mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Agar dapat dibuat kebijakan yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi

faktor- faktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi kurang maksimal. Di bidang kesehatan misalnya, Pemerintah Kota Depok perlu lebih intensif menggalakkan Posyandu dan RW siaga.

Pada sektor bidang pendidikan, upaya menaikkan rata-rata lama sekolah dapat ditempuh dengan mengaktifkan kejar paket A, paket B maupun paket C serta memastikan penduduk usia sekolah dapat bersekolah semuanya. Setelah mengikuti kejar paket A dan paket B, apabila masih terkejar umurnya, perlu dimasukkan kembali ke pendidikan formal. Perlu pula dilakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia. Diantaranya adalah meningkatkan peran semua komponen masyarakat untuk bersinergi meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arima S, Datta GS, Liseo B. 2015. Bayesian Estimators for Small Area Models when Auxiliary Information is Measured with Error. *Scandinavian Journal of Statistics*. Vol. 42: 518 –529. doi: 10.1111/sjos.12120
- Bae, K., D. Han, and H. Sohn. 2012. Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. *International Review of Public Administration* 17 (1): 55–77.
- Chongvilaivan, A. and J. Kim. 2013. Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*. 1–20
- Dawber J, Würz N, Smith P. 2019. *The Development of Regional CPIH : Assessment of Small Area Estimation for Regional Expenditure Weights*. Newport (UK): Office for National Statistics.
- de Silva, I. and S. Sumarto. 2013. Poverty-growth inequality triangle: the case of Indonesia. TNP2K Working Paper. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle\(1\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf)
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books Limited.
- Kemenparekraf. 2014. *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Novkaniza F, Notodiputro KA, Sadik K, Mangku IW. 2023. Poisson-Lognormal Model with Measurement Error in Covariate for Small Area Estimation of Count Data. *Communication in Mathematical Biology and Neuroscience*, pp. 1–20, <https://doi.org/10.28919/cmbn/7779>
- Pratesi M. 2016. *Analysis of Poverty Data by Small Area Estimation*. UK: John Wiley & Sons, Inc

- Rao JNK and Molina I. 2015. *Small Area Estimation Second Edition*. New Jersey: John Willey & Sons, Inc
- Sadik K dan Notodiputro KA. 2006. Metode E-blup dalam Small Area Estimation untuk Model yang Mengandung Random Walk. *Forum Statistika dan Komputasi*. Vol 11 No 2, p:37-41.
- Sadik, K. 2009. Metode Prediksi Tak-Bias Linear Terbaik dan Bayes Berhirarki untuk Pendugaan Area Kecil Berdasarkan Model *State Space* [disertasi]. Bogor: IPB University
- Seidman, K. F. (2005). *Economic Development Finance*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Singh T, Wang S, Carroll RJ. 2015. Efficient Small Area Estimation when Covariates are Measured with Error Using Simulation Extrapolation. *The 60th ISI World Statistics Congress*, Rio De Janeiro, Brazil
- The Equality Trust. 2011. "Income inequality: Trends and Measures." Equality Trust Research Digest; no.2: pp.1–8
- Torabi M. 2011. Small Area Estimation Using Survei Weights with Functional Measurement Error in the Covariate. *Australian & New Zealand Journal of Statistics* Volume 53, Issue 2 p. 141-155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-842X.2011.00623.x>
- Torkashvand E. 2016. On Small Area Estimation Problems with Measurement Errors and Clustering [Dissertation]. Winnipeg: The University of Manitoba
- Wan, G. and Z. Zhou. 2004. Income Inequality in Rural China: Regression-based Decomposition Using Household Data (No. 2004/51). WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER).
- Wicaksono E, Amir H, and Nugroho A. 2017. The Sources of Income Inequality in Indonesia: a Regression-Based Inequality Decomposition. ADBI Working Paper Series.

- World Bank. 2016. Indonesia's rising divide. Washington, DC: World Bank Group.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>
- Wurz N, Schmid T, Smith P, Tzavidis N. 2017. Construction of Regional Consumer Price Indices using Small Area Estimation. In Statistische Woche: 2017, Rostock, Germany. 19 Sep 2017 - 22 Feb 2018.
- Ybarra LMR, Lohr SL. 2008. Small Area Estimation when Auxiliary Information Measured with Error. *Biometrika* 95(4): 919-931.
- Zhu R, Zou GH. BLUP Estimation of Linear Mixed-Effects Models with Measurement Errors and Its Applications to The Estimation of Small Areas. *Acta Math. Sin. Engl. Ser.*, vol. 30, no. 12, pp. 2027–2044, 2014, DOI: 10.1007/s10114-014-2707-5.



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Gedung Dibaleka II
Komplek Balaikota Depok Lantai 7
Jalan Margonda Raya No.54 Depok
Telp: (021) 29402276 dan (021) 7764410
Email: diskominfo@depok.go.id